



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.14, No.2, Desember 2017

DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civillian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 2	Hlm. 109-290	Jakarta, Desember 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i–ii
Catatan Redaksi		iii–iv
Artikel		
	• Fenomena <i>Post Democracy Party</i> di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya <i>Firman Noor</i>	109–125
	• Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM <i>Sri Yanuarti</i>	127–147
	• Polisi Sipil (<i>Civillian Police</i>) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian <i>Sarah Nuraini Siregar</i>	149–164
	• Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu <i>Ismah Rustam</i>	165–181
	• Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan <i>Deasy Silvyia Sari</i>	183–196
	• Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia <i>Diandra Megaputri Mengko</i>	197–208
	• Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i>	209–226
	• Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i>	227–242
Resume Penelitian	• Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i>	243–264
	• Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i>	265–279
Review Buku	• <i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i>	281–288
Tentang Penulis		289–290
Pedoman Penulisan		291–295

CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, ” **Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya**”, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, ”**Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM**”. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel ”**Polisi Sipil (Civillian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian**” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel ”**Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu**” yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang ”**Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan**” yang ditulis oleh Deasy Silvyia Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul ”**Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia**” membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul ”**Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia**”. Atikel ini menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 321.8
Firman Noor

**FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY*
DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR
BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN
DAMPAKNYA**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092
Sri Yanuarti

**PENGAWASAN INTELIJEN
DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratis menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratis menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *immunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih ditujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

**POLISI SIPIL (*CIVILLIAN POLICE*)
DALAM REFORMASI POLRI:
UPAYA & DILEMA ANTARA
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI
KEPOLISIAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

DDC: 320.12

Ismah Rustam

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –
LAUT SULU**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

DDC: 959.164

Deasy Silvy Sari

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN
LAUT TIONGKOK SELATAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m², Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m², Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m², Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m², dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m². Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat

penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

DDC: 363.3

Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti

RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militan di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarinya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan keduanya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

**FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL
PARTAI-PARTAI POLITIK
DI INDONESIA ERA REFORMASI**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

**MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH
SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI
SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA
DAN POLITIK DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Kata kunci: Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8
Firman Noor

**THE POST DEMOCRACY PARTY
PHENOMENON IN INDONESIA:
A STUDY ON THE BACKGROUNDS,
CHARACTERISTICS, AND IMPACTS**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical frame work, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

Keywords: Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092
Sri Yanuarti

**DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION
AS INSTRUMENTS PREVENTION OF
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.

In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

Keywords: Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164

Civillian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civillian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civillian Police.

Keywords: Civillian Police, Police Reform, human rights violations

DDC: 320.12

Ismah Rustam

MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

Keywords: maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

DDC: 959.164

Deasy Silvya Sari

MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terorrism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

Keywords: Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani and Feriana
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING
WITH THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE
MOVEMENT IN INDONESIA**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

Key words: *Indonesia, influence, Islamic State, response*

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL
OLIGARCHY NETWORK**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264

Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.

Keywords: *female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.*

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA
ERA REFORMATION**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized

party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is a essential.

Keywords: Faction, Political Party, Conflict, Reformation

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

**TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN
INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288

This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael Buehler's The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced

the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.

Keywords: Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.

**FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY* DI INDONESIA:
KAJIAN ATAS LATAR BELAKANG, KARAKTERISTIK
DAN DAMPAKNYA**

***THE POST DEMOCRACY PARTY PHENOMENON IN INDONESIA:
A STUDY ON THE BACKGROUNDS, CHARACTERISTICS,
AND IMPACTS***

Firman Noor

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: firman.noor@yahoo.co.id

Diterima: 19 Oktober 2017; direvisi: 23 November 2017; disetujui: 20 Desember 2017

Abstract

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical frame work, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

Keywords: *Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.*

Abstrak

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kata kunci: *Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.*

Pendahuluan

Era reformasi yang ditandai dengan kebangkitan demokrasi di Indonesia menjadi saksi bagi munculnya banyak partai dengan berbagai macam latar belakang dan karakternya. Sebagian partai yang kemudian berkiprah itu merupakan kelanjutan dari partai-partai yang dibentuk di masa Orde Baru. Beberapa yang lain mengaitkan dirinya dengan partai-partai berpengaruh di masa demokrasi liberal, apakah itu Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI) atau Partai Nahdatul Ulama (PNU). Sebagian partai menyatakan diri sebagai “anak kandung” atau terikat secara emosional dengan ormas-ormas berpengaruh di Indonesia, seperti NU atau Muhammadiyah. Ada pula partai yang tumbuh dari embrio kalangan aktifis dakwah kampus dengan ideologinya yang khas. Kesamaan semua partai-partai itu adalah memiliki kecenderungan dilahirkan secara kolektif oleh lembaga atau kelompok masyarakat yang memang telah berakar dan memiliki basis massa di tanah air. Basis massa tersebut sedikit banyak dipengaruhi atau terkait dengan ideologi atau *raison de être* tertentu, apakah itu nasionalisme, agama, sosialisme, ataupun developmentalisme.

Namun dalam perkembangannya, Era Reformasi memunculkan fenomena menarik, yakni terdapat partai-partai yang tidak memiliki basis masa atau kelompok pendukung ideologis yang sejak awal berkomitmen untuk mendukungnya. Partai-partai demikian pada umumnya diinisiasi oleh mereka yang berlatar belakang pengusaha namun tergerak untuk berkecimpung dalam dunia politik untuk merealisasikan idealisme dan kepentingannya. Partai-partai ini, terutama di awal-awal keberadaannya, bergantung pada para figur pendiri, yang disebabkan tidak saja karena eksistensi partai itu sendiri yang cenderung menjadi “kendaraan politik personal” para figur pendiri, namun pula karena ketergantungan finansial partai kepada mereka.

Fenomena semacam ini terjadi di banyak negara. Salah satu partai yang menjadi contoh *par excellent* di level internasional untuk fenomena ini adalah *Forza Italia* (Majulah Italia). Partai ini didirikan oleh Silvio Berlusconi, seorang konglomerat yang menguasai beberapa industri penting di Italia, terutama media massa. *Forza Italia* bukanlah partai yang dibangun oleh politisi atau aktifis politik, melainkan oleh

jaringan usaha raksasa Berlusconi, bersama para analis politik profesional dan sebagian karyawan perusahaannya yang mendedikasikan diri untuk berperan sebagai aktifis politik. Dengan bantuan jaringan media, terutama Fininvest, partai ini mampu membangun citra positif dan berhasil memenangkan pemilu setahun setelah didirikan. Dalam perkembangannya, ketergantungan *Forza Italia* pada Berlusconi demikian besar hingga cenderung menjadi sebuah institusi pribadi yang mendedikasikan diri untuknya. Atas kondisi ini, partai ini kerap disebut sebagai “*personality party*”.¹

Berangkat dari situasi di atas, artikel ini mengkaji beberapa aspek dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dalam konteks *post-democracy* (pasca demokrasi), atau dalam artikel ini disebut sebagai partai *post-democracy*. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) latar belakang atau situasi politik yang melatarbelakangi dan inisiator utama kehadiran partai-partai *post-democracy*, (2) karakter partai-partai tersebut dan (3) dampak yang ditimbulkan, tidak saja bagi partai itu sendiri namun bagi kehidupan demokrasi secara umum. Pembahasan juga akan menyentuh sejauh mana *framework* dari *post-democracy* itu tepat dalam membaca kondisi partai-partai tersebut.

Kajian mengenai partai-partai politik di Indonesia itu sendiri sudah demikian banyak dan meliputi juga beragam aspek. Namun demikian, kajian yang membahas partai-partai yang muncul setelah satu dekade reformasi dan yang mengaitkannya dengan fenomena *post-democracy* masih cukup jarang, untuk tidak mengatakan tidak ada. Kajian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman tentang eksistensi demokrasi kontemporer dan kiprah partai-partai baru di dalamnya.

¹ Lihat: Jörg Seisselberg, “Conditions of success and political problems of a ‘media-mediated personality-party’: The case of Forza Italia”, *West European Politics*. Vol.19, No.4 (1996): 715–743. Lihat: Jean Blondel dan Niccolo Conti, “Italy” dalam Inoguchi, Takashi and Blondel Jean. *Political Parties and Democracy: Contemporary Western Europe and Asia*. (New York: Palgrave Macmillan, 2012), hlm. 88.

***Post-Democracy* sebagai Tatanan Politik Baru**

Post-democracy adalah bukanlah sebuah situasi kembali ke masa *pre-democracy*, yang ditandai misalnya dengan bercokolnya kembali figur pemimpin tunggal atau sistem politik otoriter. *Post-democracy* justru hadir ketika lembaga-lembaga berikut mekanisme demokrasi sudah berjalan. Untuk dapat memahami hakekat *post-democracy* dan kehadiran partai-partai di era *post-democracy* itu, artikel ini akan menguraikan lebih dulu makna *post-democracy* secara ringkas dengan menggunakan perspektif Crouch.

Menurut Crouch, dewasa ini demokrasi yang mengandalkan peran aktif masyarakat – terutama kelas menengah yang memiliki kepedulian dan kesadaran politik untuk membangun tatanan politik yang berkeadilan, berkemanusiaan dan sederajat (*equal*) – telah bergeser, ditandai dengan munculnya kelompok baru yang mengambil alih peran masyarakat tersebut. Berbeda dengan karakter kelas menengah penggerak demokrasi, kalangan baru ini lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah.

Kalangan ini kuat secara ekonomi dan dalam spektrum politik bukanlah pendukung gerakan-gerakan sosial khas kaum kiri. Kalangan ini memiliki kesadaran bahwa melalui penguasaan politik mereka dapat merealisasikan kepentingannya termasuk mengamankan kekuasaan ekonominya. Kalangan ini dalam perkembangannya menciptakan wacana politik baru berikut “opsi-opsi solusi praktis” atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka menggiring pandangan, opini dan sikap politik publik yang diklaim sebagai “kepentingan umum”. Namun, menurut Crouch klaim tersebut bersifat superfisial, karena kepentingan eksklusif merekalah yang pada akhirnya lebih terakomodir. Dalam kondisi seperti ini nuansa superfisial demokrasi atau atmosfer oligarkis menghantui dinamika kehidupan politik riil.

Pergeseran aktor politik dan munculnya situasi baru, yang kemudian disebut sebagai *post-democracy*, tersebut muncul bersamaan dengan dua fenomena penting lain. *Pertama*, meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap politik. Partai politik dan politisi dianggap

tidak lagi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka. Situasi ini belakangan memberikan peluang kepada aktor politik baru untuk mengambil alih peran politisi lawas dan partai politiknya. Dengan kekuatan ekonominya, para aktor baru itu leluasa mendesain dan menggerakkan sebuah bangunan partisipasi politik baru sehingga menggugah khalayak untuk terlibat (lagi) dalam politik.

Pergerakan mereka semakin intens menjelang pemilu. Fokus utama para aktor politik baru ini adalah pada *electoral enabling*, yakni mendapatkan suara sebanyak-banyaknya melalui mobilisasi massa yang massif. Tujuan ini relatif terbantu dengan rendahnya tingkat kepedulian dan pemahaman politik masyarakat, yang mengakibatkan mereka menjadi rentan dimobilisir. Untuk memformalkan tujuan tersebut mereka membentuk partai yang kemudian disebut Crouch sebagai firma politik. Firma politik ini berisikan pengusaha atau pemilik modal berikut konsorsium bisnisnya, yang ditopang oleh penasehat-penasehat politik profesional, para pelobi dan jaringan media berikut para awaknya. Mereka inilah yang kemudian menjadi pesaing dari “awak klasik” partai politik, seperti simpatisan, anggota, dan kader partai.

Kedua, munculnya fenomena makin melebarnya jarak antara partai dengan masyarakat. Fenomena ini tidak sekadar dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap partai-partai, namun juga karena lepasnya ketergantungan partai-partai dari komunitas pendukung yang selama ini menopang kegiatannya, termasuk dalam soal pemenuhan kebutuhan finansial. Bila dulu partai hidup dari sumbangan sukarela kader dan simpatisan, maka dimulai sejak era tahun 1960-an dan terus menjadi tren di dunia Barat di tahun 1970-an lambat tapi pasti peran tersebut digantikan oleh negara dan kalangan pengusaha.² Alasannya adalah untuk membantu mempertahankan eksistensi partai sebagai pilar penting demokrasi.

Kondisi “kemandirian finansial” ini menguat sejak partai mulai terbiasa berimprovisasi mendapatkan dana besar dari kalangan pengusaha untuk menopang kehidupannya. Muncul kemudian simbiosis

² Richard Katz and Peter Mair, *How Party Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*, (London: Sage Publication, 1994).

mutualisme dimana konsesi berupa kebijakan yang menguntungkan para pengusaha adalah harga yang harus dibayar oleh partai. Dalam perkembangannya, situasi ini justru memancing para pengusaha untuk lebih dalam masuk dalam kehidupan politik. Mereka melihat peluang untuk tidak lagi sekadar menjadi “donatur tetap”, dengan konsesi hanya berupa beberapa proyek pemerintah, melainkan pula menjadi pemain politik yang diperhitungkan. Untuk itulah mereka kemudian membangun imperium politiknya sendiri dengan kontrol penuh atasnya.

Dampaknya adalah tidak saja para pengusaha dapat menentukan setiap agenda partai, namun pula mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Crouch situasi ini menandai berakhirnya demokrasi, dan menjadi pembuka jalan bagi *post-democracy*, mengingat penentuan atau kata putus tentang agenda apa yang akan dijalankan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan ditentukan secara eksklusif oleh segelintir orang saja. Situasi di atas menjadi latar belakang kehadiran partai-partai *post democracy*.

Karakter Partai *Post-Democracy*

Crouch (2015)³ melihat bahwa partai *post-democracy* memiliki beberapa karakter. *Pertama*, dapat mencukupi sendiri dalam memproduksi elite-elite di lingkungan terdalam partai (*comprises a self-reproducing inner circle*) tanpa perlu menimbang keberadaan kalangan kader atau simpatisan. Lingkaran konsentrik partai – dari yang paling kecil yakni elite partai, kemudian anggota aktif (yang disiapkan sebagai cikal bakal elite di masa datang), menuju yang paling luas yakni simpatisan – menjadi sumir.

Ada semacam *breakthrough* yang menyebabkan jajaran elite dapat saja berasal dari kalangan bukan simpatisan atau non-kader, asalkan memberikan “kontribusi nyata” bagi partai. Di sinilah maksud dari “firma politik” itu. *Kedua*, berjarak dengan massa (*remote from its mass movement base*), mengingat keberadaannya lebih bergantung pada jaringan korporasi elite ketimbang jaringan akar rumput. *Ketiga*, sebagai konsekuensinya, partai berada dalam posisi ketergantungan timbal balik dengan para korporat, yang tentu saja

mengharapkan imbalan politik manakala partai-partai itu berkuasa.

Sementara Dommett (2015)⁴ menafsirkan pandangan Crouch itu dengan menunjukkan tiga karakter partai di era *post-democracy*, yakni pertama, cenderung membangun agenda politik yang bersifat *top down*, berlandaskan terutama masukan penasihat politik profesional dan para korporat, ketimbang masukan dari khalayak. Kedua, partai menjadi sebuah “*a formal shell*” atau “*an ellipse*”, diisi terutama oleh para profesional dan kelompok korporat, bukan politisi kader yang berdampak pada menguatnya keterasingan masyarakat atas partai dan menyebabkan loyalitas dan partisipasi kader dalam partai bersifat semu. Ketiga, partai juga mengalami problem dalam membangun komunikasi publik, karena memosisikan diri sebagai penjual produk dan berbicara satu arah layaknya iklan, ketimbang memperlakukan publik sebagai mitra dialog.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, artikel ini menafsirkan karakter partai *post-democracy* sebagai (1) “firma politik” karena keunikannya dalam menyusun *inner circle* (lingkar dalam) yang eksklusif (2) *self-sufficient*, yakni mampu mencukupi kebutuhan finansialnya secara mandiri dengan mengandalkan terutama peran pendiri dan korporatnya, (3) pragmatis-personal, yakni mengutamakan upaya-upaya menyukseskan *electoral enabling* dan di sisi lain dikontrol oleh figur-figur pendiri yang determinan dalam kehidupan keseharian partai, (4) cenderung bersifat *top-down* dalam menyusun agenda partai, dan (5) memiliki problem dalam hal menjaga loyalitas dan menghadirkan partisipasi yang murni (*genuine*), disebabkan terutama oleh kecenderungan menjadi *formal shell*.

Dalam artikel ini juga akan dikaji tiga partai sebagai objek studi yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ketiga partai tersebut memiliki kesamaan yakni, bergantung pada seorang figur dalam hampir berbagai persoalannya. Figur-figur itu sendiri memiliki latar belakang pengusaha. Aktifitas partai digerakkan terutama oleh dukungan finansial

³ Colin Crouch, *Post-Democracy*, (Cambridge: Polity Press. 2004), hlm.70-77.

⁴ K. Dommett “Post-Democratic Party Politics”. *Political Quarterly*. 2015. <http://eprints.whiterose.ac.uk/91469/>.

yang kuat dan tidak bergantung pada partisipasi anggota melainkan pada kekuatan perorangan atau sekelompok orang. Kemudian partai-partai ini tumbuh dan berkembang di masa-masa ketika *post-democracy* dalam banyak hal telah menemukan bentuknya di Indonesia.

Latar Belakang Kehadiran

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Crouch, kehadiran partai *post-democracy* berkorelasi dengan kondisi masyarakat dan negara yang telah memasuki era *post-democracy*. Beberapa kondisi *post-democracy* muncul pula di Indonesia tidak lama setelah era reformasi bergulir. Menjelang kemunculan partai-partai *post-democracy*, masyarakat Indonesia mengalami kekecewaan terhadap partai politik. Setelah harapan yang amat tinggi di awal reformasi, yang ditandai oleh maraknya partai dan tingginya partisipasi pada Pemilu 1999, lambat laun masyarakat mulai menjaga jarak dengan partai-partai.

Kajian Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI menyimpulkan bahwa di mata masyarakat partai politik dianggap lebih sebagai bagian dari masalah dan bukan solusi terhadap masalah yang ada.⁵ Lingkaran Survey Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2005-2012 rasa terikat atau mengidentifikasi diri kepada partai (*party id*) mengalami penurunan.⁶ Bahkan wacana demokrasi tanpa kehadiran partai politik mulai disuarakan.⁷

Di sisi lain, kebanyakan partai lebih sibuk pada urusan internalnya, terutama dalam rangka konsolidasi sebagai respon atas maraknya friksi di antara sesama kader. Kader-kader partai di parlemen lebih terfokus pada persoalan-persoalan terkait pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan. Intensitas perhatian partai kepada masyarakat yang lemah ini membuat simpati dan loyalitas masyarakat kepada partai makin merosot. Tidak mengherankan jika kemudian ketidakstabilan (volatilitas) partai di Indonesia, sebagai buah

⁵ Lihat: Mahrus Irsyam dan Lili Romli (eds), *Menggugat Partai Politik*, (Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003).

⁶ Lingkaran Survei Indonesia, *Cuplikan Laporan Penelitian Tahun 2005-2012*, (Jakarta: LSI, 2012).

⁷ Utan Parlindungan, "Demokrasi tanpa Parpol", *Kompas*, 10 Agustus 2011.

dari lemahnya loyalitas pemilih termasuk yang tinggi di dunia.⁸

Jarak antara partai dan masyarakat juga membuat dukungan simpatisan masyarakat dalam soal pendanaan partai semakin mengecil. Di sisi lain, partai tidak dapat mengandalkan kontribusi kader.⁹ Dengan kondisi seperti ini sumbangan tokoh, pebisnis besar atau negara semakin dibutuhkan. Sebagai konsekuensinya beberapa pebisnis besar pun dengan mudahnya menduduki posisi kunci di beberapa partai, tanpa harus melalui jenjang kaderisasi yang ketat. Tren pengusaha-pengusaha masuk dan bertarung langsung dalam dunia politik mulai semakin terasa mengingat pertarungan politik selalu melibatkan banyak sekali dana. Sebagai contoh, dalam pertarungan pemilihan presiden misalnya, setidaknya setiap kandidat harus menyiapkan anggaran sebesar US\$600 Juta.¹⁰ Belakangan para pengusaha besar itu melangkah lebih jauh. Mereka tidak lagi hanya ingin menjadi donatur namun justru menginisiasi kemunculan partai-partai baru dan mengontrolnya secara langsung.

Baik Gerindra, Nasdem atau Perindo tidak terlepas dari kondisi-kondisi di atas. Gerindra yang dideklarasikan pada tahun 2008, atau satu dekade setelah reformasi, diinisiasi oleh beberapa tokoh dari beragam latar belakang termasuk kalangan intelektual, aktifis dan pengusaha. Namun, pendirian partai ini sendiri amat bergantung pada sosok pengusaha besar yakni, Hashim Djojohadikusumo.

Hasim adalah salah satu orang terkaya di Asia menurut catatan Forbes di tahun 2012, dengan kekayaan sebesar Rp. 85 Trilyun. Dengan kekayaannya itu, Hasim masuk dalam daftar lima puluh besar orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2013 Majalah Globe

⁸ Paige Johnson Tan. "Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy", *Contemporary Southeast Asia*, Vol.28, No.1 (2006), hlm. 98.

⁹ Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011), hlm. 89-113.

¹⁰ Sonya Angraini dan Ulisari Eslita, "Indonesia's Wealthiest Get the Political Itch". 20 November 2013. <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2013/11/20/from-boardroomto-istana-2/#7406dedf5146>, diakses pada 17 Maret 2017.

Asia menempatkannya sebagai orang terkaya ke-37 di Indonesia dengan kekayaan sebesar US\$ 1,05 Milyar. Perusahaannya yang bernama PT. Tirta Mas dan Arsari Group menjadi salah satu perusahaan yang disegani di Indonesia. Bisnis Hashim merambah bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Bisnis gas dan minyak yang dimilikinya terbentang mulai dari Aceh hingga Papua. Dengan kekayaannya itu tidak saja dia mampu menyelamatkan bisnis Prabowo dan membantunya dalam Pilpres 2014, namun menjadi tulang punggung utama bagi partai yang dibentuknya.

Adapun Prabowo sempat menjadi pemimpin perusahaan Kiani Kertas. Posisi tersebut memberikan kesempatan bagi Prabowo untuk melebarkan jaringan pertemanan dengan kalangan pengusaha. Pilihan menjadi pengusaha dilaluinya tidak lama setelah diberhentikan dari dinas kemiliteran. Setelah cukup lama tinggal di Yordania, Prabowo kembali ke Indonesia dan memutuskan untuk terjun dan fokus dalam dunia sosial politik. Prabowo mengatakan, “... *Kalau bukan karena dorongan teman-teman dan panggilan nurani untuk ikut memulihkan negara dari kondisi keterpurukan, ingin rasanya saya tetap mengabdikan di jalur bisnis...*”¹¹

Tanpa kehadiran dan dukungan Hashim, Gerindra tidak akan pernah terwujud. Dalam situs resmi partai jelas diceritakan bahwa para penggagas pendirian partai sebenarnya tidak lagi banyak berharap untuk dapat mewujudkan Gerindra. Namun, harapan tersebut akhirnya terwujud setelah Hashim menyatakan dukungan penuh untuk pendirian partai yang dideklarasikan pada 6 Februari 2008.¹² Kasus Gerindra menunjukkan model partai *post-democracy* yang berbeda dengan kasus Forza Italia, dimana Hashim tidak menjadi pimpinan ataupun menjadi pembina utama partai. Hashim nampak menyadari bahwa Prabowo lebih mumpuni dalam soal-soal tersebut. Namun, mengingat perannya yang spesial dan kenyataan bahwa Prabowo saat pendirian Gerindra juga seorang pengusaha, tepat pula jika dikatakan

bahwa inti utama dari pendirian Gerindra adalah jaringan bisnis dan pengusaha.

Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi pada Nasdem. Partai yang didirikan pada tahun 26 Juli 2011 ini sangat bergantung pada sosok pengusaha besar Suryadharma Paloh. Kesuksesan dan rekam jejak usaha Paloh sedikit banyak mirip dengan Berlusconi. Keduanya sama-sama memiliki jaringan usaha media yang besar dan disegani. Paloh adalah pemilik dari sejumlah media di bawah payung Media Group seperti, PT Media Televisi Indonesia, Harian Media Indonesia, dan PT Citra Media Nusa Purnama. Usahanya juga merambah dunia perhotelan. Pada tahun 2013 Paloh masuk dalam jajaran 150 orang terkaya di Indonesia (pada urutan ke-91) menurut Majalah Globe Asia dengan kekayaannya berkisar US\$ 387 Juta. Paloh telah bergerak dalam dunia usaha sejak usia belasan tahun. Nalurnya yang tajam dalam bisnis media telah mengangkat namanya ke pentas nasional, sebagai salah satu pionir bisnis media modern yang disegani. Namanya semakin berkibar setelah pada tahun 2000 mendirikan Metro TV, stasiun televisi pertama yang fokus pada berita di Indonesia.

Paloh memutuskan untuk membentuk partai setelah sebelumnya memimpin mendirikan ormas dengan nama Nasdem. Pendirian ormas itu beriringan dengan ketidakberhasilan Paloh menduduki posisi ketua umum Partai Golkar. Paloh adalah kader Golkar yang membina karir politik dari bawah. Sebagai pengusaha dan kader Golkar, Paloh memahami arti penting keterlibatan pengusaha dalam dunia politik dan memiliki ambisi besar untuk menguasai partai. Pendirian Partai Nasdem dengan sendirinya menjadi akhir dari ormas Nasdem, yang memang dinisbatkan untuk tidak berpolitik. Di partainya yang baru, Paloh tidak saja inisiator pendirian Nasdem, namun menjadi sosok menentukan dalam penyusunan kepengurusan dan pembuatan agenda-agenda strategis, yang kerap dilakukannya dengan tanpa kompromi.

Demikian juga dengan Perindo, sosok yang memainkan peran penentu partai adalah Hary Tanoesoedibjo. Dalam dunia usaha di Indonesia, Hary bukanlah sosok asing. Dia adalah bagian dari keluarga pengusaha dan memiliki jaringan usaha yang terutama meliputi bisnis media yang dirintisnya sejak akhir tahun 1980-an. Diawali dengan mendirikan Bhakti Investama,

¹¹ Profil Prabowo Subianto dalam <http://partaigerindra.or.id/profil-prabowo-subianto-ketua-dewan-pembina-partai-gerindra>, diakses pada 17 Maret 2017.

¹² Sejarah Partai Gerindra dalam <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>, diakses pada 17 Maret 2017.

jaringan usaha Hary saat ini berkibar dengan nama MNC Corporation. Kerajaan bisnisnya merambah bidang media, pertambangan, finansial, transportasi dan properti. Di bidang media namanya berkibar sebagai pimpinan Global Mediacom yang didalamnya ada RCTI, MNC dan Global TV serta Radio Sindo Trijaya. Hary juga merupakan pemilik Sindo Media yang membawahi surat kabar nasional Koran Sindo dan Sindo Weekly. Kedekatannya dengan Donald Trump sempat diangkat menjadi berita oleh Forbes, yang pada tahun 2017 juga menyebutnya sebagai bagian dari 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan US\$ 1,15 Milyar.¹³

Hary sempat bergabung ke Partai Nasdem pada tahun 2011 dan menduduki jabatan Ketua Dewan Pakar. Perbedaan pandangan yang tidak terjembatani dengan Paloh soal kepemimpinan di Nasdem membuatnya keluar dari partai tersebut. Hary sempat bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang didirikan oleh Jenderal Wiranto. Posisinya sebagai donatur utama partai tersebut sempat membuatnya menduduki posisi strategis di Hanura yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan bahkan menjadi Cawapres dari partai tersebut menjelang Pilpres 2014. Namun, perbedaan pandangan kembali muncul karena Wiranto cenderung mendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Tidak lama berselang Hary memutuskan mundur dari Hanura dan membentuk partai sendiri. Hary kemudian mendeklarasikan Perindo sebagai sebuah partai pada 7 Februari 2014 di Jakarta.

Dapat dikatakan Perindo adalah hasil pemikiran dan kerja Hary seorang pengusaha yang memiliki orientasi dan ambisi politik yang kuat. Untuk mewujudkan dan membesarkan partainya dia banyak memanfaatkan jaringan bisnis dan pertemanannya. Kemampuan finansialnya yang kuat memungkinkan Perindo bergerak dengan gesit dalam membentuk kepengurusan hingga ke pelosok nusantara. Dengan dukungan pendanaan yang besar ini sebagian kalangan meyakini bahwa Perindo akan berpeluang untuk dapat berkiprah lebih jauh dalam politik nasional.¹⁴

¹³ “Hary Tanoesoedibjo” dalam <https://www.forbes.com/profile/hary-tanoesoedibjo/?list=indonesia-billionaires>, diakses pada 17 maret 2017.

¹⁴ Wahyu S. Kuncahyo, “Pengamat: Perindo Andalkan Uang untuk Pencitraan. 20 Juli 2015. <http://politik.rmol.co/read/2015/07/20/210611/Pengamat:->

Karakter Partai dan Dinamika Kekinian

Pembahasan di bawah ini akan menunjukkan beberapa karakter dari partai-partai *post-democracy* di Indonesia. Meski sebagian mengonfirmasi pandangan Crouch, pembahasan menunjukkan adanya gradasi karakter yang memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan yang tidak selamanya sejalan persis dengan apa yang dibayangkan oleh Crouch.

Eksklusifisme Pembentukan Lingkaran Dalam: Firma Politik

Latar belakang kehadiran Gerindra, Nasdem dan Perindo memperlihatkan bahwa ketiganya banyak bergantung pada segelintir orang, baik dalam konteks ide awal pendirian maupun perluasan jaringan partai. Partai-partai ini dapat berdiri sendiri dengan hanya mengandalkan jaringan yang telah dibangun oleh para pemrakarsanya. Bandingkan misalnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang banyak mengandalkan jaringan Nahdlatul Ulama, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jaringan Muhammadiyah atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jaringan tarbiyah (*Ikhwanul Muslimin*). Begitu pula misalnya dengan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDIP yang banyak memanfaatkan jaringan partai hingga ke pelosok yang telah ada sejak zaman Orde Baru. Peran jaringan lawas itu demikian besar dan turut menentukan kualitas pelembagaan.¹⁵

Pada partai-partai *post-democracy*, jaringan yang dimaksud meliputi jaringan usaha, lembaga sosial kemanusiaan, ormas, serta jaringan pertemanan pribadi. Kesemuanya menjadi penopang utama dalam pembentukan dan rekrutmen pengurus. Organ-organ yang terkait dengan bisnis para pendiri dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dijadikan tulang punggung dalam proses pengisian jabatan kunci dalam *inner-circle* partai. Pada Gerindra, peran jaringan usaha, sosial, profesi dan pertemanan yang dimiliki Hashim dan Prabowo, yang juga pada saat itu telah beralih profesi sebagai

Perindo-Andalkan-Uang-untuk-Pencitraan-, diakses pada 26 Maret 2017.

¹⁵ Lihat: Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*, (New York: Routledge. 2008).

pengusaha, demikian besar bagi Gerindra. Duet Hashim dan Prabowo memungkinkan partai mendapat topangan finansial yang signifikan sekaligus mendapatkan jaringan dukungan terutama di awal-awal pembentukannya. Beberapa aktifis dan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang dipimpin Prabowo ataupun teman-teman lama di dinas kemiliteran dan Golkar dimasukkan dalam struktur partai. Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani adalah contoh dari gerbong HKTI yang dibawa oleh Prabowo dalam Gerindra.

Situasi yang sama terjadi pada Nasdem. Beberapa pengurus ormas Nasdem bersedia menjadi pengurus Partai Nasdem, termasuk misalnya Ferry Mursidan Baldan, mantan petinggi Partai Golkar. Selain itu, Paloh juga mengerahkan karyawan-karyawannya untuk mendukung pendirian dan aktifitas partai. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Metro TV menjadi salah satu alat politik Paloh untuk mendukung pandangan dan pilihan politik Nasdem. Bahkan, para karyawan di salah satu stasiun TV berita terbesar di Indonesia itu dihibau untuk menjadi anggota Nasdem dan berkecimpung di dalamnya. Hampir sama dengan Berlusconi, Paloh menggerakkan industri media massa yang dipimpinnya untuk menjadi corong *public relation* partai dan untuk berkomitmen membesarkan Nasdem. Hal ini membawa dampak pada konten pemberitaan Metro TV yang nampak disesuaikan dengan sikap dan garis politik Nasdem.

Perindo juga mengalami kondisi yang sama. Hary juga memanfaatkan jaringan bisnis media massa yang dimilikinya. Sebagai orang nomor satu di Perindo, dia membawa sejumlah awak perusahaannya dalam partai yang didirikannya. Jika dilihat dari susunan pengurus Dewan Penguru Pusat (DPP) Perindo terlihat beberapa nama seperti yang notabene adalah tangan kanan Hary di perusahaannya terutama di media massa, seperti Ketua Bidang Litbang dan IT Perindo Sururi Alfaruq yang notabene adalah Presiden Direktur Koran Sindo. Situasi ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Berlusconi yang memasukan beberapa orang kepercayaan di perusahaannya ke dalam *Forza Italia*, seperti Cesare Previti dan Marcello Dell'Utri yang bekerja di Publitalia 80 yang merupakan perusahaan iklan di bawah naungan Fininvest.

“Firma politik” menjadi salah satu hal yang menandai keberadaan partai-partai ini. Meski demikian dalam perkembangannya, nuansa firma ini berpotensi menghilang. Kebutuhan untuk mengakomodir lebih banyak pihak dengan beragam latar belakang menyebabkan partai tidak dapat lagi membatasi diri dengan jaringan asalnya dan terus menerus memberlakukannya secara istimewa. Di Gerindra dan Nasdem, baik pada level lokal atau nasional, sudah terlihat upaya pemenuhan kebutuhan membina dan menumbuhkan kader-kader baru dengan mekanisme yang umumnya dilakukan oleh partai, lainnya. Pelatihan dan pembinaan kader terus dilakukan di beberapa daerah, yang dari sana diharapkan kepengurusan partai di semua level akan dapat terisi. Singkatnya, kebutuhan dasar semacam inilah yang akhirnya mendorong partai-partai itu memiliki perangkat “konvensional” yang dimiliki sebuah partai politik pada umumnya. Situasi yang sama bukan tidak mungkin akhirnya akan terjadi pula di Perindo.

Self-Sufficient

Kemapanan finansial para pendiri menyebabkan partai-partai tersebut terutama pada masa-masa awal formasinya, tidak banyak bergantung pada khalayak maupun pemerintah, apalagi kepada iuran anggotanya. Dalam perspektif Hopkin mengenai tipe keuangan partai, partai-partai ini termasuk dalam kategori ketiga, yakin model *self-financing elite party*.¹⁶ Dalam model ini partai mampu mencukupi dirinya, namun kecukupan itu tidak dipenuhi oleh anggotanya melainkan oleh elite partai. Partai dengan model ini sayangnya cenderung pada oligarki ketimbang menguatkan demokrasi, karena terbiasa pada semangat eksklusifisme dan elitisme dalam pembuatan kebijakan partai.¹⁷

Kondisi keuangan semacam ini merupakan tren di kebanyakan partai. Kajian Perludem, misalnya, mengindikasikan bahwa partai-partai di Indonesia pada umumnya tidak mengandalkan diri pada iuran anggota. Kebanyakan sumber dana berasal dari sumbangan tidak mengikat dan upaya-upaya yang diusahakan oleh elite

¹⁶ Jonathan Hopkin, “The Problem with Party Finance: Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics”. *Party Politics*. Vol. 10. No. 6, (2004), hlm.634-635).

¹⁷ *Ibid.*, hlm.636-640.

partai, termasuk politisi partai yang menduduki jabatan publik.¹⁸ Fenomena ini sekaligus menunjukkan dalam soal dana, karakter *post-democracy* menjangkiti hampir semua partai yang ada. Hanya saja dalam kasus partai-partai *post-democracy* kecenderungan tersebut jauh lebih kuat.

Gerindra misalnya, pemenuhan dana untuk kegiatan-kegiatan level pengurus cabang atau ranting dapat mengandalkan DPP. Hanya dengan sebuah proposal DPP dapat menurunkan bantuannya segera. Bahkan, ada selentingan kabar yang mengatakan pengurus partai ini dibayar hingga Rp50 Juta per-bulan.¹⁹ Sementara Nasdem, terutama di awal-awal keberadaannya, juga dikabarkan menggaji para pengurusnya.²⁰

Nasdem juga bahkan berkomitmen untuk membantu kadernya yang ingin maju dalam pileg dengan bantuan dana sebesar Rp. 5-10 Milyar.²¹ Ini merupakan sebuah komitmen partai yang cukup fantastis untuk ukuran partai di Indonesia. Kemampuan DPP Perindo juga cukup besar melayani kegiatan pengurus di level-level daerah. Banyak kegiatan untuk mendongkrak aktifitas dan meluaskan promosi pengurus lokal, seperti kegiatan sosial, budaya atau kepemudaan, disponsori oleh DPP. Demikian kuat nuansa dukungan DPP ini hingga sempat beredar isu bahwa DPP menyediakan dana Rp300 Juta per 1 DPC tiap tiga bulan.

Dengan dukungan dana sedemikian besar, tidak mengherankan ketiga partai ini dapat melalui proses verifikasi partai dengan mudah. Meski demikian, Gerindra dan Nasdem belakangan memperlihatkan bahwa upaya *self-sufficinet* itu tidak dapat dipenuhi secara konstan. Semakin membengkaknya kebutuhan internal

partai dan kegiatan-kegiatan lain baik yang bersifat pembinaan, promosi atau kepemiluan menyebabkan partai menjadi semakin realistis untuk mulai menggali tambahan dana kegiatan, yang tidak lagi seluruhnya dibebankan kepada DPP, khususnya pada para pendirinya. Partai-partai *post-democracy* pun akhirnya memanfaatkan jabatan publik dan jaringan politik untuk mendapatkan suntikan dana segar bagi pemenuhan kegiatan partai. Kader justru mulai dijadikan mesin uang²² Partai-partai memang pada umumnya mengatur soal ini dalam aturan main partai.²³ Dinamika ini menunjukkan bahwa partai-partai *post-democracy* cenderung bergerak pada bentuk partai standard yang ketergantungan pada negara menjadi semakin kuat dan partai pun akan kembali mengharap kesadaran dukungan keuangan pengurus, kader dan anggotanya, terutama sekali mereka yang telah menduduki jabatan publik.

Pragmatis-Personal

Secara umum partai-partai *post-democracy* cukup menunjukkan keberpihakan terhadap hal-hal yang bersifat populis dan nasionalis. Agenda-agenda seperti ekonomi kerakyatan, kemandirian ekonomi, kesejahteraan rakyat, kedaulatan negara, nasionalisme ekonomi, restorasi kehidupan politik menuju kedaulatan rakyat, menjadi hal-hal yang terus disuarakan. Nampaknya kepentingan untuk berkomitmen dengan agenda politik tersebut, sekaligus berinvestasi politik agar lebih mendapat dukungan dari publik di masa-masa selanjutnya mendorong adanya kontekstualisasi dan popularisme agenda politik mereka.

Sintesa antara kepentingan eksklusif para pendiri dan komitmen pada tema-tema dan opsi-opsi politik populis menjadi sebuah simptom politik kontemporer di Indonesia, yang kerap disebut sebagai pragmatisme. Dengan mengusung kepentingan pragmatis, tidak berarti elite partai mengorbankan jaringan kekuasaan ekonominya. Hashim, Paloh atau Hary, beserta segenap jaringan korporat di belakangnya, tetap memiliki posisi yang cukup terpendang dalam dunia bisnis nasional. Dalam nuansa ini

¹⁸ Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2011), hlm.89-113.

¹⁹ Redaksi, "Pengurus Gerindra Digaji Rp5-Rp50 Juta Per Bulan", 12 Juli 2012, <http://beritasatu.com/politik/59544-pengurus-gerindra-digaji-rp5-rp50-juta-per-bulan.html>, diakses pada 23 Maret 2017.

²⁰ "Wow..Pengurus Partai NasDem Digaji", 1 Juni 2012, <http://rakyatsulsel.com/wow-pengurus-partai-nasdem-digaji.html>, diakses pada 23 Maret 2017.

²¹ Slamet Riyadi, "Biayai caleg, Nasdem tidak minta imbalan", 23 Juni 2012. <https://economy.okezone.com/read/2012/06/23/435/652341/biayai-caleg-nasdem-tidak-minta-imbalan>, diakses pada 25 Maret 2017.

²² Redaksi, "Kader Jadi Mesin Uang Parpol". 16 Juni 2012. <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/18/01413573/twitter.com>. diakses pada 26 Maret 2017.

²³ Veri Junaidi dkk, *op.cit.*, hlm. 89-113.

Crouch dengan kritis menilai bahwa partai-partai ini pada akhirnya lebih memusatkan perhatian pada bagaimana mendapatkan perhatian publik secara massif, ketimbang benar-benar mengembangkan partisipasi politik yang efektif, yang darinya masyarakat dapat mengontrol seluruh transaksi ekonomi politik di dalam lembaga-lembaga kekuasaan. Ujung-ujungnya kepentingan *inner circle* tetap diutamakan, yang akhirnya memelihara ketergantungan partai pada pendirinya. Dalam konteks ketergantungan, partai tumbuh menjadi lembaga personal. Peran para figur pendiri sulit diabaikan dalam kehidupan partai-partai *post-democracy*. Ketergantungan pada sosok figur ini tidak saja dalam soal-soal pembangunan jaringan partai, para elite pendiri ini juga berperan penting dalam konteks pembangunan simbol, karakter, tujuan dan *values* (nilai-nilai) bagi partai.

Di Gerindra, duet Hashim-Prabowo menentukan nama dan lambang partai. Karakter partai yang terkesan militeristik juga sedikit banyak dipengaruhi oleh Prabowo yang memiliki latar belakang militer. Sementara peran Paloh juga nyaris sama, termasuk dalam soal menentukan kata putus mengenai lambang partai. Bongkar pasang pengurus sesuai selera Paloh menjadi salah satu indikasinya. Adapun di Perindo, bagaimana membangun citra sebagai partai yang peduli terhadap kebangkitan ekonomi rakyat kecil menjadi salah satu *core objectives* yang banyak diinisiasi oleh Hary.

Kondisi *personality party* ini berpotensi berlangsung cukup lama. Peluang terjadinya transformasi akan besar manakala para pendiri itu telah meninggalkan partai. Jika hal itu tidak terjadi proses transformasi akan berlangsung lambat. Gerindra misalnya, saat ini justru sempat mengangkat Prabowo memegang dua posisi kunci sekaligus yakni sebagai ketua dewan pembina dan ketua umum partai. Paloh telah menguasai posisi ketua umum, setelah sebelumnya “hanya” sebagai ketua dewan pembina. Kedudukan struktural dan kultural-historis Hary memungkinkannya terus bertengger dalam puncak kekuasaan partai dan tidak mudah tergeser hingga beberapa tahun ke depan.

Meski berjalan relatif lambat, bukan berarti tidak ada pergeseran sama-sekali. Pergeseran sebenarnya dibuka oleh para pendiri

itu sendiri kepada tokoh-tokoh yang dipercaya untuk menentukan lebih banyak lagi jawaban dan kebijakan bagi partai. Posisi beberapa elite partai seperti Fadli Zon atau Ahmad Muzani di Gerindra sedikit banyak adalah bentuk regenerasi secara bertahap di partai Gerindra. Pilihan semacam itu menjadi semakin realistis mengingat secara organisatorial partai mereka menjadi semakin kompleks, begitu pula dengan target-target politik yang semakin dinamis. Namun demikian, membayangkan bawa para pendiri itu akan *hands off* tentu saja masih terlalu dini, apalagi untuk sebuah partai belia seperti Perindo.

Top-Down Agenda Setting

Dalam soal *agenda setting* partai-partai *post-democracy* menampakkan gejala yang kompleks. Di satu sisi, substansi beberapa kebijakan partai cenderung bersifat populis, yang menunjukkan komitmen pada kepentingan rakyat banyak. Di sisi lain, proses pengambilan kebijakan masih jauh dari nuansa demokrasi. Pilihan-pilihan kebijakan bukanlah hasil dialog panjang dan bernas antara elite dengan pengurus partai pada umumnya. Tidak mengherankan jika beberapa kalangan pemerhati meyakini bahwa demokrasi internal masih merupakan soal besar yang belum terpecahkan.²⁴

Hal ini karena pandangan dan kepentingan para pendiri cenderung menjadi prioritas utama. Tidak jarang hal ini membuat friksi dalam internal partai, karena tidak semua kalangan bersepakat dengan kecenderungan memberikan prioritas pada usulan kebijakan yang diinisiasi oleh para pendiri partai. Namun, secara umum perlawanan itu tidak banyak dan dapat diredam segera, meski kerap dengan cara-cara sepihak. Selain karena kedudukan pendiri yang istimewa dan harus diakomodir, nuansa *top-down* juga terjadi karena dialog antara partai dengan simpatisan partai apalagi rakyat kebanyakan tidak berjalan intens.

Bagi partai khalayak banyak, yang awam politik, bukanlah partner yang dibutuhkan dalam penyusunan agenda partai. Akibatnya, masukan

²⁴ Lalu Rahadian, “Regenerasi Parpol, CSIS: Di Partai tak Terjadi Proses Demokrasi”. 15 Desember 2014. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141215145933-32-18238/csis-di-partai-tak-terjadi-proses-demokrasi-internal/>, diakses pada 1 April 2017.

dari akar rumput tidak banyak berperan. Partai-partai lebih bergantung pada sebuah tim pakar atau penasihat politik, termasuk para *pollster*, yang bertugas membaca arah perkembangan politik dan mengarahkan partai untuk merambah isu-isu strategis.

Namun demikian, kondisi seperti di atas tidaklah terjadi secara konstan. Ada kalanya partai-partai mendengar pandangan berbagai pihak. Saat ini, partai mulai membuka diri dengan khalayak. Kecenderungan untuk membuka diri bahkan terlihat pada kasus-kasus partai di Eropa Barat, yang selama ini menjadi sumber kritik Crouch. Menurut Domett (2015), partai-partai di Eropa Barat, terutama di Inggris Raya dan Prancis, telah menunjukkan gejala untuk makin membuka diri dalam beberapa tahun belakangan ini.²⁵ Sementara di Indonesia partai-partai *post-democracy* kerap juga turun ke jalan dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Selain itu, ada limitasi bagi para elite untuk dapat memahami situasi riil di level daerah. Dalam konteks politik kekinian yang menyaratkan sebaran pengurus yang demikian luas di seluruh Indonesia maka akan semakin tidak realistis jika banyak keputusan partai ditentukan oleh segelintir orang saja.

Formal Shell: Loyalitas dan Partisipasi yang Superfisial

Di awal pembentukannya, partai-partai *post-democracy* cenderung menjadi “*formal shell*” yang ditandai oleh eksklusifisme penataan struktur partai dan keterjarakan signifikan dengan massa. Meski partai-partai lain di Indonesia dalam kenyataannya juga memiliki masalah pelik dengan massa²⁶ namun, persoalan ini menjadi berlipat ganda bagi partai-partai *post-democracy* mengingat tidak ada warisan komunitas akar rumput pendukung yang dimilikinya.

Dengan situasi tanpa akar rumput, bagaimana membangun loyalitas massa akar rumput pada akhirnya menjadi persoalan besar. Loyalitas tentu saja tidak ada jika

partai menjadi *ephemeral* (segera hilang dari peredaran) atau memiliki tingkat volatilitas tinggi. Loyalitas yang dibangun oleh partai-partai *post-democracy* lebih banyak ditentukan dan dipelihara oleh pendekatan pragmatis yang berorientasi pada uang dan jelas berbiaya tinggi. Kegiatan-kegiatan partai juga melibatkan perputaran uang DPP yang diharapkan dapat mengikat loyalitas pada partai. Namun, tentu saja upaya membangun dukungan yang loyal tentu tidak dapat terus menerus dilakukan dengan hanya mengandalkan kekuatan finansial. Keberlangsungan hal ini justru akan semakin mempersulit membangun loyalitas akar rumput yang diharapkan.

Persoalan partisipasi dan loyalitas juga muncul karena komunikasi politik yang cenderung dibangun oleh partai-partai *post-democracy* bersifat artifisial yakni, terkait dengan mengamankan suara semata. Muncul sebuah fenomena sebagaimana yang dikatakan oleh Dommett (2015) bahwa partai cenderung menjadi “...rarely aspire to any complexity of language or argument and aim not engage in discussion but to persuade to buy...”²⁷ Dalam hal ini dialog yang mendalam lagi bermakna menghilang, digantikan oleh semangat promosi satu arah. Masyarakat adalah sekadar target mobilisasi yang diberlakukan tak lebih hanya sebagai pendengar pasif.

Partisipasi yang berkembang akhirnya menjadi tanpa makna mengingat kepentingan khalayak tidak benar-benar tertampung di dalamnya. Kerumunan yang membludak dan semarak dari kegiatan-kegiatan partai—termasuk kegiatan sosial, keagamaan, budaya, kepemudaan, rekreasi dan olah raga—hanya temporal, berfungsi terutama mengukuhkan eksistensi partai dan para elitnya. Kegiatan-kegiatan partisipasi aktif yang bersifat dua arah dengan rutinitas yang stabil dan benar-benar menjadi input bagi partai tidak berkembang.

Namun, berapa lama partai-partai tersebut dapat terus beroperasi dalam nuansa keterjarakan dan komunikasi nir dialog ini? Tentu tidak akan mudah bertahan. Kenyataannya partai-partai semakin membutuhkan banyak masukan dari publik untuk dapat bertahan dan berkembang. Dialog menjadi salah satu media untuk dapat menentukan opsi-opsi mana yang lebih masuk akal di mata publik dan sejalan dengan kehendak

²⁵ K. Domett “Post-Democratic Party Politics”. *Political Quarterly*. 2015. <http://eprints.whiterose.ac.uk/91469/>.

²⁶ Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*, (New York: Routledge. 2008).

²⁷ K. Dommett., *op.cit*

mayoritas. Momentum pilkada juga memaksa partai membuka dialog dengan berbagai pihak termasuk akar rumput.

Dalam perkembangannya partai-partai *post-democracy* cenderung memilih semakin mendekati diri kepada khalayak meski hal itu tetap dikombinasikan dengan hukum besi oligarki partai. Hasilnya terlihat misalnya pada Gerindra di Jawa Barat yang menunjukkan keberhasilan meningkatkan suara. Kecerdikan Nasdem dalam memilih figur-figur populis untuk masuk dalam jajaran partai membuat partai lebih atraktif dan memberikan suntikan loyalitas, meski memang loyalitas itu lebih pada figur ketimbang partai. Sementara Perindo berupaya terus melakukan kegiatan-kegiatan di akar rumput untuk menjaga simpati dan loyalitas rakyat. Loyalitas memang bukan sesuatu yang mudah dibangun untuk partai-partai bertipe *post-democracy*, namun hal ini bukan berarti tertutup sama sekali.

Beberapa Dampak: Tantangan bagi Demokrasi

Kehadiran partai-partai berkarakter *post-democracy* menimbulkan beragam dampak yang tentu saja kompleks. Dampak tersebut meliputi hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Secara spesifik *terdapat* dua tantangan utama yakni, (1) pelembagaan partai yang problematis, dan (2) kecenderungan oligarki.

Pelembagaan Partai yang Problematis

Berbagai parameter telah dikembangkan oleh ilmuwan politik terkait dengan pelembagaan partai. Artikel ini memanfaatkan empat dimensi yang dikembangkan oleh Randal dan Svasand, yakni: (a) derajat kesisteman, (b) *value infusion*, (c) reifikasi dan (d) *decisional autonomy*.²⁸

Derajat kesisteman menyangkut dua hal utama yakni kompleksitas elemen dalam partai dan rutinisasi. Kompleksitas terjadi manakala berbagai urusan dalam partai terdistribusi ke beberapa sub-sistem, bagian atau lembaga-lembaga. Semakin sub-sistem itu mengatur hal dengan detail dan memiliki kewenangan

²⁸ Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", *Party Politics*, Vol. 8 (Januari 2002).

yang penuh atasnya, maka sebuah partai dapat dikatakan terlembaga. Namun, manakala dalam praktiknya berbagai urusan ditentukan oleh segelintir orang yang menyebabkan keberadaan sub-sub sistem itu menjadi disfungsi, maka partai tersebut tidak dapat dikatakan terlembaga. Dengan kata lain, ketergantungan yang besar partai-partai *post-democracy* atas figur-figur (pendiri), berpotensi besar menyebabkan derajat kesisteman menjadi rendah.

Adapun rutinisasi adalah manakala semua aktifitas, tugas dan penyelesaian persoalan dijalankan di atas rel aturan main yang ada secara kontinum atau konsisten. Dalam batas atau proporsi tertentu, sosok figur kuat masih boleh memainkan peran, meski demikian hal itu tidak boleh hingga menyebabkan aturan main menjadi tidak berperan. Pada partai-partai *post-democracy* adanya personifikasi yang kental dari sosok pendiri cenderung menyebabkan aturan main menjadi demikian ringkih. Keterbatasan peran aturan main ini menandai belum terlembaganya partai-partai tersebut.

Peran besar Prabowo, Paloh dan Hary memang membawa banyak keuntungan bagi partai, yang oleh Panebianco dikatakan bahwa pada kadar tertentu keberadaan elite seperti mereka dibutuhkan.²⁹ Namun, manakala hal itu tidak tertata atau terawasi dengan baik, hal itu akan membawa efek buruk bagi upaya pelembagaan partai. Sulit dipungkiri bahwa ketergantungan itu masih demikian besar, meski upaya-upaya distribusi kekuasaan telah dilakukan. Akibatnya secara umum kerap kepentingan pendiri tetap menjadi lebih utama. Alasan beberapa pengurus Nasdem baik di pusat maupun di daerah mundur, misalnya, dilandasi oleh alasan tidak lagi dapat menerima sikap otoriter Paloh yang kerap melanggar aturan main partai.³⁰

Untuk *value infusion*, dimensi ini juga tampak lemah. Dengan fokus partai pada persoalan *electoral enabling* yang lebih menekankan pada pragmatisme, nilai-nilai tentang jati diri dan kepatutan (*code of conduct*)

²⁹ Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and Power*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

³⁰ Y. Gustaman, "Konflik Partai Nasdem. Bekas Sekjen Nasdem Surya Paloh Otoriter". 21 Januari 2013. <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/21/bekas-sekjen-nasdem-surya-paloh-otoriter>, diakses pada 26 Maret 2017.

cenderung berjalan seadanya dan tidak terkontrol. Upaya-upaya pematapan jati diri partai lebih banyak bergantung pada kreatifitas individu dan bukan hasil sebuah rekayasa ideologis yang digerakkan secara sistematis. Akhirnya partai-partai *post-democracy* lebih dikenal khalayak lebih sebagai “lembaga amal” yang mendekati publik melalui pendekatan berorientasi uang, ketimbang berorientasi membangun karakter atau nilai-nilai.

Selain itu, pematapan ideologi yang seadanya, disusul kemudian dengan kedudukan ideologi yang sering kali tidak menjadi referensi utama, juga menyebabkan jati diri partai tidak terbangun. Muncul kemudian berbagai kontroversi dimana antara nilai atau idealisme yang hendak dibangun dan praktek di lapangan menjadi tidak sinkron. Sosok Paloh yang demikian kuat dan sulit berkompromi atau bahkan disebut sebagai otoriter, misalnya, nampak kontradiktif dengan tujuan partai untuk menguatkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan dalam hal dikenal luas oleh masyarakat (reifikasi) partai *post-democracy* berpotensi berhasil memenuhinya dengan baik mengingat kemampuan finansial dan penguasaan media mereka yang demikian kuat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Tomsa bahwa pemanfaatan media yang tepat memungkinkan sebuah partai sukses dalam soal reifikasi. Hal ini ditambah dengan cukup maraknya berbagai aktifitas partai yang dikemas dalam nuansa budaya atau sosial-kemanusiaan. Begitu pula aktifitas politik langsung seperti pemilu dan pilkada juga mendorong partai untuk lebih memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Meski demikian, partai-partai ini belum dapat sepenuhnya menghindari keterjarakan dengan khalayak. Ini mengingat pendekatan yang dilakukan lebih dalam rangka “mendulang suara” bukan “memenangkan hati”. Dengan kondisi seperti ini rasa keterikatan masyarakat yang lebih kuat masih merupakan persoalan besar.

Situasi lebih kompleks terjadi pada hal *decisional autonomy*. Partai-partai *post-democracy* di satu sisi mampu terbebas dari intervensi kepentingan pihak luar. Kemampuan mencukupi dirinya sendiri relatif kuat, yang membuat tingkat kerentanan untuk menjadi corong pihak luar menjadi rendah. Namun di sisi lain, jika otonomi partai adalah

berarti kemandirian untuk menentukan arah kebijakan dalam segenap aspek secara murni dan konsisten, dimensi *decisional autonomy* menjadi problematik. Hal ini karena kedudukan pendiri partai yang dominan kerap menyebabkan kepentingan pribadinya dapat demikian mudah mendikte arah dan kepentingan partai. Oleh karenanya, kualitas dimensi *decisional autonomy* bagi partai-partai *post-democracy* masih ambigu, karena meskipun mereka dapat menjaga kemandirian dalam konteks eksternal, namun secara internal potensi intervensi individu (pemimpin) terhadap institusi (partai) masih besar.

Dampak dari situasi ini membuat partai menyimpan banyak potensi persoalan. Beberapa persoalan dan potensi persoalan itu termasuk di antaranya adalah lemahnya soliditas internal (yang biasanya disusul dengan faksionalisasi), terabaikannya suara mayoritas kader, ketergantungan yang terus menerus terhadap figur (ketimbang sistem), hilangnya semangat *merit system* (yang menimbulkan kompetisi tidak sehat), hingga makin menguatnya pragmatisme dan konstitusionalisme. Mundurnya pengurus Gerindra secara beramai-ramai di Sulawesi Selatan pasca ditunjuknya Ketua DPD Baru Idris Maggabarani oleh DPP, meski kebanyakan pengurus daerah menolaknya menunjukkan fenomena ini.³¹ Sementara itu, Perindo Kota Bogor juga menyatakan bubar dan pengurusnya ramai-ramai hengkang setelah merasa tidak lagi memiliki visi yang sama dengan Hary.³²

Dengan memiliki beragam potensi negatif tersebut tentu saja partai-partai *post-democracy* sulit untuk tumbuh menjadi partai modern yang mampu menjalankan segenap fungsinya secara maksimal. Manakala hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh partai akan mudah terjerembab menjadi kepentingan eksklusif dan alat bagi kepentingan segelintir orang. Dengan

³¹ Hasanudin Aco, “Gerindra Sulsel Dikabarkan “Pecah” Menyusul Isu Penunjukan Ketua Baru oleh Prabowo”. 8 Januari 2017. <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/08/gerindra-sulsel-dikabarkan-pecah-menyusul-isu-penunjukan-ketua-baru-oleh-prabowo>, diakses pada 20 Maret 2017.

³² Vento, Saudale, “Beda Visi dengan Hary Tanoe, Perindo Kota Bogor Bubar”. 15 Januari 2016. <http://www.beritasatu.com/nasional/341495-beda-visi-dengan-hary-tanoe-perindo-kota-bogor-bubar.html>, diakses pada 23 Maret 2017.

itu, dugaan Crouch bahwa partai akhirnya akan lebih menguatkan kondisi *post-democracy*, ketimbang demokrasi, menjadi kenyataan.

Kecenderungan Oligarki

Selain persoalan pelembagaan, partai-partai *post-democracy* juga berkecenderungan menjadi partai yang oligarkis. Ketergantungan yang tinggi pada segelintir orang atau bahkan pada satu orang saja kembali menjadi penyebabnya. Ketergantungan itu kerap tidak saja untuk urusan-urusan di level pusat namun pula di level lokal. Para pimpinan partai di level lokal, di sisi lain, selalu merasa harus “mendapatkan petunjuk” dari para pendiri itu. Kondisi semacam ini tampak wajar bagi kehidupan partai, sebagaimana yang dikatakan oleh Robert Michels sebagai sebuah “hukum besi oligarki” yang selalu ada dalam kehidupan partai.³³

Oligarki semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Fenomena ini dapat ditekan hingga pada level yang menyebabkan suara mayoritas kader dapat lebih terdengar. Situasi ini jelas baik bagi partai mengingat dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab yang lebih kuat di antara kader. Lebih dari itu, oligarki yang dibiarkan akan merugikan kehidupan demokrasi itu sendiri, tidak saja dalam konteks internal partai namun pula dalam konteks eksternal. Kesimpulan para Indonesianis tentang kondisi politik nasional hingga saat ini menunjukkan bahwa oligarki dengan berbagai variannya hadir, bahkan tetap kuat, beriringan dengan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia.³⁴ Marak pula apa yang disebut Katz dan Mair sebagai “politik kartel” yang melibatkan hampir semua partai yang ada.

³³ Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, (New York: The Free Press, 1966), hlm.353-35.

³⁴ J. A. Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia” dalam Michele Ford and Thomas B. Pepinsky, *Beyond Oligarchy. Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2014. Lihat juga:

Richard Robison dan Vedi .R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, (London: RoutledgeCurzon, 2004). Lihat juga: J. A. Winters, *Oligarchy*, (New York: Cambridge University Press, 2004).

Situasi ini dalam banyak aspeknya nampak sejalan dengan hakekat *post-democracy* itu sendiri.

Masih terkait dengan kecenderungan oligarki, di era reformasi hadir pula fenomena “simbiosis mutualisme” antara kalangan elite partai, pengusaha dan pemerintah. Fenomena ini muncul karena lemahnya transparansi. Di tahun 1950-an, situasi ini disebut sebagai “fenomena Ali-Baba”, di mana kebijakan pemerintah dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok sebagai kompensasi atas dukungan atau kedekatan politik. Selain itu, hadir pula korupsi bersifat rente, sebagai efek negatif dari upaya kader untuk menambal keperluan atau kebutuhan partai yang semakin membengkak.

Kasus Mohamad Sanusi dan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, keduanya kader Gerindra yang mendapat uang suap dari para pengusaha, baik dalam kasus Raperda Rencana Zonasi Pantai Utara Jakarta maupun gas BUMD Bangkalan menunjukkan soal ini. Tidak wajibnya iuran bagi anggota partai, mendorong partai untuk mencari sumber keuangan dari negara.

Beberapa kasus yang menimpa kader-kader partai *post-democracy* sedikit banyak terkait dengan persoalan kompensasi jabatan ataupun kebijakan. Kasus Rio Capella, mantan Ketua Umum dan Sekjen Partai Nasdem, misalnya, menunjukkan upaya kader partai untuk turut mendapatkan kompensasi politik dan mempengaruhi proses peradilan. Dia terbukti menerima suap untuk mencegah terjadinya proses peradilan yang harusnya dijalani oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.³⁵ Kondisi semacam ini dengan berbagai variannya juga terjadi di kalangan partai-partai lain mengingat persoalan mendasar ketidakmandirian keuangan juga menimpa partai-partai tersebut.³⁶

³⁵ A.N Kemala Movanita, “Patrice Rio Capella Divonis 1,5 Tahun Penjara”. 21 Desember 2015. <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/21/16562101/Patrice.Rio.Capella.Divonis.1.5.Tahun.Penjara>, Diakses pada 26 Maret 2017.

³⁶ Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology. Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*, (Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series, 2013).

Oligarki pada akhirnya menimbulkan masalah pada citra partai di mata publik. Partai dipersepsikan sebagai hanya mengambil keuntungan pribadi. Alih-alih terbangun kesepahaman, keterasingan dan kecurigaan publik terhadap partai-partai masih terasa. Tidak mengherankan jika tren rasa keterjarakan publik terhadap partai tidak kunjung membaik. Kondisi ini memang bukan khas Indonesia, melainkan juga terjadi di banyak negara.³⁷ Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pengembangan demokrasi perwakilan mengingat partai sebagai salah satu unsur terpenting di dalamnya justru mendapatkan ketidakpercayaan dari publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Max Weber, partai-partai adalah bagian dari “anak-anak demokrasi”³⁸ sehingga sebenarnya secara substansial dan praktis demokrasi akan sulit hidup tanpa partai.³⁹

Meski beragam kondisi di atas terjadi, perkembangan partai-partai di Indonesia menunjukkan situasi lain yang juga menarik. Komitmen untuk tidak larut terhadap kepentingan kelompok mayoritas dilakoni oleh partai-partai ini. Keputusan Gerindra untuk menjadi oposisi bagi pemerintah, untuk memelihara *checks and balances*, baik di era SBY ataupun Jokowi menunjukkan bahwa partai memiliki sikap tegas. Begitu juga sikap Gerindra dan Perindo yang mendukung pasangan non-petahana pada ajang bergengsi Pilkada DKI 2017, meski mayoritas partai mendukung petahana. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa partai-partai *post-democracy* dapat pula menunjukkan gelagat yang menguatkan kehidupan demokrasi. Situasi ini menunjukkan bahwa lingkungan *post-democracy* tetap membuka peluang bagi partai-partai *post-democracy* untuk melakukan hal positif, yang pada gilirannya nanti dapat membantu penguatan demokrasi.

³⁷ Russel J. Dalton, David M. Farrell, dan Ian McAllister, *Political Parties & Democratic Linkage, How Parties Organize Democracy*, (New York: Oxford University Press. 2011).

³⁸ Max Weber, “The Advent of Plebiscitarian Democracy” dalam Peter Mair (ed), *The West European Party System*, (Oxford: Oxford University Press. 1990), hlm. 35

³⁹ Elmer E. Schattschneider, *Party Government*, (New York: Farrar and Rinehart. 1942), hal.1. Lihat juga: Russel J. Dalton, David M. Farrell, dan Ian McAllister, *Political Parties & Democratic Linkage, How Parties Organize Democracy*, (New York: Oxford University Press. 2011, hlm.3.

Penutup

Pasca satu dekade Era Reformasi kehidupan partai politik di Indonesia ditandai dengan kehadiran partai-partai baru. Beberapa partai menunjukkan karakter sebagai partai *post-democracy* dengan peran besar pengusaha dan pemanfaatan jaringan bisnis sebagai penggerak utamanya. Dalam perkembangannya meski beberapa kasus dan fenomena yang ada di Indonesia hampir sejalan dengan prediksi Crouch, secara umum terjadi beberapa perkembangan menarik dimana beberapa karakter mengalami pergeseran.

Dalam soal keunikan dalam menyusun *inner circle* yang eksklusif, keseluruhan partai mengalami terutama pada saat pembentukan awal partai. Namun demikian dalam perkembangannya terdapat kecenderungan kuat bahwa firma politik tidak dapat bertahan lama. Partai lebih semakin terbuka untuk menerima mereka yang awalnya tidak terkait dengan jaringan korporat partai. Hal yang sama juga terjadi dalam soal kemampuan mencukupi kebutuhan finansialnya secara mandiri. Meski peran pendiri partai masih cukup besar untuk membuat partai tetap bergerak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya, partai membutuhkan beberapa alternatif sumber pemasukan partai terutama di daerah-daerah, yang akhirnya diusahakan sendiri oleh para pengurus partai.

Pergeseran juga terjadi dalam soal penyusunan agenda kerja. Beberapa partai mulai membuka diri terhadap masukan dari akar rumput, bahkan mulai melakukannya secara lebih rutin. Namun demikian secara umum penyusunan agenda terutama di level pusat dan untuk hal-hal yang bersifat strategis pola *top-down* masih tetap tidak terhindarkan. Dengan kata lain, perubahan bersifat lambat. Kondisi ini juga terjadi dalam soal menghadirkan partisipasi dan membangun loyalitas yang lebih murni. Meski peluang untuk berpartisipasi semakin terbuka, partisipasi masih bersifat terbatas, mengingat karakter partai yang cenderung mengandalkan pola oligarkis. Loyalitas kepada partai pun masih bersifat pragmatis. Namun demikian, tidak berarti partai-partai *post-democracy* tidak berhasil membangun basis dukungan.

Perubahan nampaknya masih cukup sulit dalam soal pengutamaan *electoral enabling*

dan peran figur-figur pendiri yang determinan dalam kehidupan partai. Peran tokoh-tokoh utama seperti Prabowo, Paloh dan Hary masih akan besar hingga beberapa tahun ke depan. Dengan berbagai kondisi tersebut tampak usia partai dan seberapa lama partai berkecimpung dalam kehidupan politik banyak mempengaruhi karakter *post-democracy*. Semakin tua usia dan lama berkecimpung dalam politik, karakter *post-democracy* justru semakin mengalami pergeseran.

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan, pembahasan menunjukkan bahwa partai *post-democracy* cenderung memiliki masalah dalam soal pelembagaan partai. Hampir dalam semua dimensi pelembagaan partai *post-democracy* menunjukkan kecenderungan lemah. Ketergantungan yang besar terhadap tokoh, kemampuan mencukupi diri dan fokus pada *electoral enabling* menjadi akar persoalan dari kecenderungan ini. Sementara dalam kaitannya dengan upaya pembangunan demokrasi, partai-partai *post-democracy* menunjukkan gelagat yang kompleks. Di satu sisi partai-partai ini cenderung menguatkan oligarki dan nilai-nilai yang mendukung ketergantungan partai atau massa pada tokoh-tokoh pendiri. Namun di sisi lain, beberapa sikap dan kebijakan partai-partai *post-democracy* cenderung menguatkan kehidupan demokrasi. Dengan demikian, kondisi *post-democracy*, secara umum, tidak selamanya memberikan kemuraman bagi kehidupan partai politik.

Daftar Pustaka

Buku

- Blondel, Jean dan Conti, Niccolo. "Italy" dalam Inoguchi, Takashi and Blondel Jean. *Political Parties and Democracy: Contemporary Western Europe and Asia*. New York: Palgrave Macmillan. 2012.
- Colin, Crouch. *Post-Democracy*. Cambridge: Polity Press. 2004.
- Dalton, Russel J; Farrell, David M dan McAllister, Ian. *Political Parties & Democratic Linkage, How Parties Organize Democracy*, New York: Oxford University Press. 2011.
- Dommett, K. "Post-Democratic Party Politics". *Political Quarterly*. 2015. <http://eprints.whiterose.ac.uk/91469/>.
- Irsyam, Mahrus dan Romli, Lili. (eds). *Menggugat Partai Politik*. Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI. 2003.
- Junaidi, Veri, dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2011.
- Katz, Richard and Mair, Peter. *How Party Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*. London: Sage Publication. 1994.
- Michels, Robert. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: The Free Press. 1966.
- Mietzner, M. *Money, Power, and Ideology. Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series. 2013.
- Panbianco, Angelo. *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge: Cambridge University Press. 1988.
- Robison, Richard dan Hadiz, Vedi .R. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoudledgeCurzon. 2004.
- Schattschneider, Elmer E. *Party Government*. New York: Farrar and Rinehart. 1942.
- Tomsa, Dirk. *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*. New York: Routledge. 2008.
- Weber, Max. "The Advent of Plebiscitarian Democracy" dalam Peter Mair (ed), *The West European Party System*, Oxford: Oxford University Press. 1990.
- Winters, J. A. "Oligarchy and Democracy in Indonesia" dalam Michele Ford and Thomas B. Pepinsky, *Beyond Oligarchy. Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications. 2014.
- Winters, J. A. *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press. 2004.

Jurnal

- Hopkin, Jonathan. "The Problem with Party Finance: Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics". *Party Politics*. Vol. 10. No. 6, (2004): 627-651.

- Katz, Richard and Mair, Peter. "Cadre, Catch-all or Cartel? A Rejoinder", *Party Politics*, Vol. 1, No.1 (1996): 5-38.
- Randall, Vicky dan Svasand, Lars. "Party Institutionalization in New Democracies", *Party Politics*, Vol. 8 (Januari 2002).
- Seisselberg, Jörg. "Conditions of success and political problems of a 'media-mediated personality-party': The case of Forza Italia". *West European Politics*. Vol.19, No.4 (1996): 715–743.
- Tan, Paige Johnson. "Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy", *Contemporary Southeast Asia*, Vol.28, No.1 (2006).

Sumber lainnya

- Aco, Hasanudin. "Gerindra Sulsel Dikabarkan "Pecah" Menyusul Isu Penunjukan Ketua Baru oleh Prabowo". 8 Januari 2017. <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/08/gerindra-sulsel-dikabarkan-pecah-menyusul-isu-penunjukan-ketua-baru-oleh-prabowo>,
- Angraini, Sonya dan Eslita Ulisari. "Indonesia's Wealthiest Get the Political Itch". 20 November 2013. <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2013/11/20/from-boardroomto-istana-2/#7406dedf5146>,
- Gustaman, Y. "Konflik Partai Nasdem. Bekas Sekjen Nasdem: Surya Paloh Otoriter". 21 Januari 2013. <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/21/bekas-sekjen-nasdem-surya-paloh-otoriter>,
- Kuncahyo, Wahyu S. "Pengamat: Perindo Andalkan Uang untuk Pencitraan". 20 Juli 2015. <http://politik.rmol.co/read/2015/07/20/210611/Pengamat:-Perindo-Andalkan-Uang-untuk-Pencitraan->
- Lingkaran Survei Indonesia. *Cuplikan Laporan Penelitian Tahun 2005-2012*. Jakarta: LSI. 2012.
- Movanita, A.N Kemala. "Patrice Rio Capella Divonis 1,5 Tahun Penjara". 21 Desember 2015. <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/21/16562101/Patrice.Rio>
- Capella. Divonis. 1.5. Tahun. Penjara
- Parlindungan, Utan. "Demokrasi tanpa Parpol", *Kompas*, 10 Agustus 2011.
- Rahadian, Lalu. "Regenerasi Parpol, CSIS: Di Partai tak Terjadi Proses Demokrasi". 15 Desember 2014. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141215145933-32-18238/csis-di-partai-tak-terjadi-proses-demokrasi-internal/>,
- Redaksi, "Pengurus Gerindra Digaji Rp5-Rp50 Juta Per Bulan", 12 Juli 2012, <http://beritasatu.com/politik/59544-pengurus-gerindra-digaji-rp5-rp50-juta-per-bulan.html>.
- Redaksi, "Kader Jadi Mesin Uang Parpol". 16 Juni 2012. <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/18/01413573/twitter.com>.
- Saudale, Vento. "Beda Visi dengan Hary Tanoë, Perindo Kota Bogor Bubar". 15 Januari 2016. <http://www.beritasatu.com/nasional/341495-beda-visi-dengan-hary-tanoë-perindo-kota-bogor-bubar.html>
- Slamet Riyadi, "Biayai caleg, Nasdem tidak minta imbalan", 23 Juni 2012. <https://economy.okezone.com/read/2012/06/23/435/652341/biyai-caleg-nasdem-tidak-minta-imbalan>
- "Wow..Pengurus Partai NasDem Digaji", 1 Juni 2012, <http://rakyatsulsel.com/wow-pengurus-partai-nasdem-digaji.html>,
- Profil Prabowo Subianto dalam <http://partaigerindra.or.id/profil-prabowo-subianto-ketua-dewan-pembina-partai-gerindra>,
- Sejarah Partai Gerindra dalam <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>
- "Hary Tanoesoedibjo" dalam <https://www.forbes.com/profile/hary-tanoesoedibjo/?list=indonesia-billionaires>,

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: aisahputrib@gmail.com.

Atika Nur Kusumaningtyas

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: atika.nur.k@gmail.com

Deasy Silvyia Sari

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvyia@unpad.ac.id

Diandra Megaputri Mengko

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: diandramengko@yahoo.com

Firman Noor

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul *Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008)*. Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

Gede Dwitya Arief Metera

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. . Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.nortwestern.edu

Ismah Rustam

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

Novie Lucky Andriyani

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Sarah Nuraini Siregar

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Sri Yanuarti

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

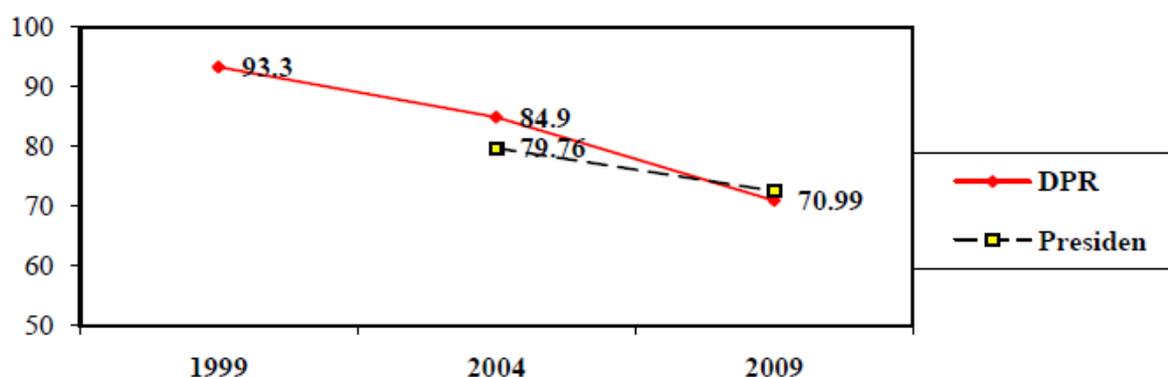
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

